MENGORGANISIR MAHASISWA ANARKIS
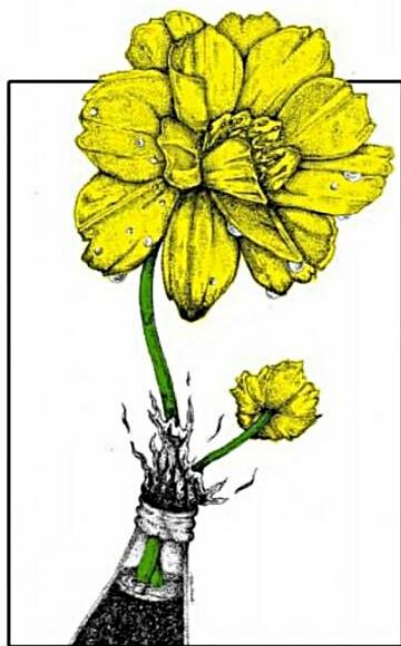
PANDUAN SINGKAT UNTUK FEDERASI MAHASISWA

Penulis
Bima Satria Putra

Gambar Sampul
Christian Adi Candra

PUBLIKASI DARING, Mei 2017.

Federasi Mahasiswa Libertarian Salatiga
Sekretariat LPM Lentera, Jl. Gajah Oya, RT.2/RW.X
depan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Blondo Celong,
Nanggulan, Salatiga, Jawa Tengah.

Facebook : Federasi Mahasiswa Libertarian Salatiga
Surel : fml.salatiga@gmail.com

Pengantar

Berangkat dari hasrat menggebu-gebu untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang rusak dan tidak adil, serta betapa kecewanya melihat masyarakat berkompromi dengan situasi, saat ini kita menyaksikan sendiri peningkatan signifikan intelektual muda di perguruan tinggi yang mulai menggandrungi gagasan sosialisme libertarian. Ia muncul dari hasil refleksi berulang kali terhadap kegagalan proyek revolusioner kiri orthodoks yang otoritarian dan tidak etis itu.

Kritik Plekhanov, Lenin, Trotsky dan kamerad orthodoks yang lain terhadap kita mungkin ada benarnya. Kecenderungan disorganisasional di kalangan sosialis libertarian telah membawa kekecewaan yang lebih tragis terhadap berbagai percobaan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih baik. Komune Paris 1871, Revolusi Spanyol 1936, Kerusuhan Paris 1968, serta kegagalan sosialis libertarian di India oleh Mahatma Gandhi, di Kuba oleh Che Guevara dan Jose Rizal & Isabelo de los Reyes di Filipina, menjadi bukti bahwa kita tidak dapat menutup telinga dari kritik tersebut. Keberhasilan Revolusi Rojava 2014 di Suriah, menuntut kita untuk mempertanyakan ulang metode-metode yang kita gunakan selama ini untuk menciptakan swa-pemerintahan demokrasi langsung dan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi: kita membutuhkan platform dan organisasi pelopor non-partai.

Banyak dari kita terpojok, menyendiri, merasa minor dan berjalan tanpa arah, namun dengan sedikit harapan, melakukan pengorganisiran individual sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip yang kita anut: kebebasan, kesetaraan, kesalingtergantungan, kerjasama, gotong-royong, dan solidaritas. Revolusi memang tercipta secara spontan, tapi revolusi tidak mungkin berhasil dengan cara-cara yang sporadis. Dan revolusi tidak akan terjadi besok, tapi ini tidak

menjadi alasan untuk memobilisasi kekuatan revolusioner pada sektor mahasiswa. Karena itu, sudah saatnya kita menghentikan gerakan dengan kecenderungan disorganisasional di kalangan mahasiswa anarkis di Indonesia.

Ayo, agitasi dan organisir diri, bersatulah dalam barikade buruh dan petani!

STUDENT UNITE! ONE BIG FEDERATION!

Daftar Isi

Bagian 1

Prinsip

Federasi paling tidak harus berdasarkan enam prinsip berikut ini:

1. **Otonom**, artinya setiap unit mulai dari yang terkecil dalam federasi dapat menjalankan kerja organisasi dan pengambilan keputusan secara mandiri, lepas dari pendiktean internal organisasi yang lebih tinggi dari strukturnya. Dalam hal ini kita perlu membedakan antara seruan dan perintah. Juga karena sifatnya yang otonom, maka prasyarat utama untuk itu adalah desentralisasi gerakan,
2. **Kolektif**, artinya setiap kerja organisasi sebisa mungkin dilaksanakan bersama untuk kepentingan bersama karena memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama pula,
3. **Egalitarian**, artinya struktur organisasi berbentuk non-hierarkis yang didalamnya setiap anggota punya kesempatan yang sama dalam kerja dan pengambilan keputusan, dan saling menghormati dalam suasana kesetaraan dan persaudaraan tanpa memandang latar belakang primordial, gender dan fisik,
4. **Voluntiristik**, artinya setiap kerja organisasi dilaksanakan oleh orang-orang yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya, dengan demikian kerja kesukarelaan harus dibedakan dengan penugasan, inisiatif individu diakomodir dan didukung selama tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan organisasi,

5. **Mutualis**, artinya setiap kerja-kerja organisasi yang dilakukan bersama, harus saling melengkapi, membutuhkan dan menguntungkan (inter-dependensi), dan
6. **Konsensus**, dalam pengambilan keputusan terkait arah dan kerja organisasi sebisa mungkin dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil hingga semua 'peserta rapat' menyetujuinya.

Bagian-bagian selanjutnya dalam panduan ini akan menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip tersebut.

Bagian 2

Pembentukan

Apa indikator yang bisa kita gunakan untuk menentukan bahwa kita telah siap untuk membentuk federasi? Apa itu siap? Mungkin anda dapat mengecap saya sebagai seorang yang bersemangat dan terburu-buru. Tapi jika kita pikirkan sekali lagi, karena bentuk dan tujuan organisasi yang hendak kita bentuk berbeda jauh dengan organisasi mahasiswa ekstra-kampus yang lain, tidak banyak hal yang perlu kita pertimbangkan untuk menentukan apa yang kita maksud

dengan siap dan tidak siap itu. Lagipula, jika kita menunggu semuanya siap, percayalah, maka kita tidak akan pernah bisa membentuk federasi.

Satu-satunya indikator yang bisa kita pertimbangkan hanyalah kuantitas dan kualitas. Untuk sebuah organisasi yang baru yang akan dibentuk, kita tidak membutuhkan banyak sekali anggota. Saya kira lima dulu sudah cukup. Jika memang ada lebih dari itu dan kesemuaannya sudah saling mengenal, maka akan jauh lebih baik.

Sementara untuk kualitas, tidak ada yang perlu diragukan lagi kecuali pemahamannya yang mendalam soal ideologi sosialis libertarian serta pengetahuan luas sejarah perjuangan kelas pekerja secara global. Adalah konyol dan memalukan jika mereka yang mempelopori pembentukan konfederasi tidak memenuhi syarat kualitas ini. Tunggu, pelopor? Ya, vanguardisme! Kita tidak perlu menafikan kepeloporan hanya karena penolakan terhadap hierarki dan otoritas, sebab kepeloporan tidak ada hubungannya dengan dua hal tersebut. Sepanjang sejarah revolusi dan pemberontakan, bahkan dengan kecenderungan libertarian sekalipun, kita bisa melihat bahwa kepeloporan akan selalu ada. Tidak mungkin tidak. Tidak ada Komune Paris 1871 tanpa peran Auguste Blanqui dan *communard*. Tidak ada Kerusuhan Mei 1968 tanpa Daniel Cohn-Bendit dan Federasi Anarkis Nanterre. Tidak ada pula Revolusi Rojava 2014 tanpa peran Abdulah Ocalan dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Walau PKK adalah partai, mereka sudah melakukan perubahan radikal secara organisasional setelah mengartikulasikan ulang model perjuangan mereka setelah kejatuhan

> Jika kita menunggu semuanya siap, percayalah, maka kita tidak akan pernah bisa membentuk federasi.

Uni Sovyet. Pun, mereka tidak melakukan revolusi melalui pemilihan dan kotak suara, mereka melakukan inseruksi.

Konsep vanguardisme sebenarnya tercoreng oleh konsep Lenin soal partai pelopor, sebuah organisasi yang otoriter yang bergerak dalam koridor negara dan menuntut disiplin dan kepatuhan mutlak para anggotanya untuk memenangkan perjuangan kelas pekerja. Konsep ini kemudian terdiskreditkan pada 1960-an oleh "Kiri Baru" dari refleksi atas pengalaman Stalinisme dan Leninisme di masa lalu. Sungguh ironis memang, sebab lebih dari satu surat kabar anarkis di masa lalu dinamakan Vanguard dan lebih dari satu karya anarkis menuntut adanya pembentukan organisasi pelopor. Karena itu, kita harus membedakan bentuk kepeloporan itu sendiri. Apa yang kita, sebagai anarkis, tolak? Kepeloporan atau partai pelopor? Saya jelas menolak yang terakhir.

Sebagai pelopor, atau apapun anda suka menyebutnya, kita tidak bisa menafikan bahwa para pendeklarasi awal federasi akan memiliki peran penting. Mereka akan memiliki tanggungjawab moral, walau tidak secara otoritas tentu saja, untuk menumbuhkan sentuhan arah kepada gerakan, memberikan peta bagaimana organisasi bergerak dan membantu memobilisasi mahasiswa dan pelajar dalam tindakan sistematis untuk mengubah masyarakat. Kegagalan mobilisasi Pemuda Merdeka pada 2016 misalnya, adalah karena kesalahan kita untuk memahami konsep kepeloporan ini. Karena menolak menjadi sangat menonjol untuk memobilisasi mahasiswa, beberapa orang yang berperan penting terpaksa menyerahkan segala urusan mobilisasi secara sporadis. Hasilnya? Tidak tercipta apapun.

Karena itu para "pelopor" ini harus memiliki semangat yang militan sebagai indikator yang terakhir. Jika secara kuantitas dan kualitas mumpuni, militan pula, maka tidak ada alasan lain supaya federasi tidak dideklarasikan segera.

Bagian 3

Struktur

Semakin kecil semakin baik. Semakin sedikit semakin mudah. Ini konsep utama yang harus dijunjung tinggi oleh federasi pelajar dan mahasiswa. Permasalahannya, ia tidak boleh ditelan mentah-mentah. Kita memang tidak semata-mata bertujuan untuk menggalang sebanyak mungkin anggota. Tetapi kita harus percaya bahwa semakin banyak anggota federasi, maka ia akan menjadi kekuatan revolusioner yang potensial saat itu juga. Jadi, kecil dan mudah itu harus kita pahami dalam kacamata kolektif yang terdesentralisasi, otonom, namun berjejaring dengan kuat yang inter-dependensi.

Saat ini kita menghadapi permasalahan urbanisasi yang menyembabkan ketidakmerataan penyebaran populasi penduduk. Menjadi sangat banyak di suatu wilayah, namun sangat sedikit di wilayah yang lain. Ramalan ke depan akan menunjukan bahwa kecenderungan ini akan menjadi lebih besar lagi akibat desakan spesialisasi dan regionalisasi sektor ekonomi kapitalisme. Hal ini juga berpengaruh kepada sistem pendidikan kita. Perguruan tinggi yang berkualitas dan besar (jika memang benar demikian), terpusat di Jawa. Pun, walau di Jawa, sebenarnya hanya tersebar di beberapa kota besar. Sehingga di satu kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta misalnya, akan terdapat puluhan perguruan tinggi dan ratusan ribu mahasiswa. Target utama kita memang bukanlah mencari sebanyak mungkin anggota, tetapi kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa ribuan mahasiswa di suatu kota akan bergabung dalam federasi suatu saat nanti. Model organisasi konvensional

seperti dapat kita saksikan pada kebanyakan organisasi saat ini, terbukti tidak akan bisa egaliter dengan kondisi seperti itu. Karena itu kita perlu mengenalkan model organisasi yang baru: sebuah organisasi horizontal untuk suatu wilayah yang luas bagi kota-kota besar.

Semakin banyak dan tersebar anggota federasi, maka kerja organisasi dan pengambilan keputusan akan menjadi tidak efektif dan efisien, yang justru akan berujung pada stagnansi dan penyerahan kerja pada semakin sedikit individu. Organisasi yang ideal adalah yang anggotanya berada dalam jarak strategis yang memungkinkan terjadinya pertemuan tatap muka secara berkala, akan lebih baik jika sudah saling mengenal pula. Dengan kata lain, model organisasi kita menuntut keberagaman bentuk sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing wilayah.

Di Rojava, rakyat mengorganisir dirinya secara langsung dalam komune-komune dan membentuk dewan-dewan. Setiap komune mengirimkan delegasi terpilih ke dewan-dewan. Dewan kampung

mengirim delegasinya ke kota, dewan kota mengirim delegasinya ke kota yang lebih besar, dan seterusnya. Setiap komune merupakan entitas mandiri, namun mereka terhubung satu sama lain melalui struktur konfederal yang bertujuan untuk koordinasi dan melindungi kepentingan publik. Ketika permasalahan tak bisa diselesaikan di level bawah, atau melampaui urusan dewan di tingkatan terendah, mereka mendelegasikannya ke tingkatan berikutnya. Instansi yang "lebih tinggi" haruslah akuntabel terhadap yang "lebih rendah" serta melaporkan setiap keputusan dan tindakannya.

Untuk kota kecil seperti Salatiga misalnya, yang hanya memiliki dua kampus berukuran sedang, satu konfederasi tanpa pemecahan apapun saya kira sudah cukup. Hal ini mungkin akan sulit untuk dilakukan di Yogyakarta. Federasi tersebut harus dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, bisa berupa unit di satu kampus UGM, satu lagi di UNY, dan satu di UMY. Karena itu federasi mahasiswa di Yogyakarta harus didesentralisasi. Kolektif-kolektif ini akan melakukan kerja dan pengambilan keputusan yang otonom. Bahkan jika memang diperlukan, kolektif di satu perguruan tinggi bisa dipecah lagi berdasarkan fakultas. Dengan demikian dalam situasi macam ini, akan ada struktur tiga jenjang dalam konfederasi di Yogyakarta: aras kota, aras universitas dan aras fakultas. Unit ini perlu kita berikan nama, bisa saja kolektif, majelis, dewan, kongres. Misalnya, Majelis Federasi UAD atau Kolektif Federasi Fakultas Filsafat UGM. Namun nama adalah urusan sepele, sangat artifisial dan bisa disepakati saat kongres federasi nasional untuk yang pertamakalinya.

"

Aras dalam struktur seperti ini jangan disamakan dengan hierarki yang menindas.

Aras dalam struktur seperti ini jangan disamakan dengan hierarki yang menindas. Sebab dalam masyarakat anarkis yang dicita-citakan itu, tidak mungkin kita melakukan pertemuan langsung

dalam skala yang lebih luas tanpa adanya lembaga sosial yang dapat memenuhi aspirasi kelas pekerja. Anarkis di Rusia misalnya mengembangkan Komunisme Dewan dalam bentuk soviet-soviet, ketika rakyat secara mandiri dan bersama-sama mengambil keputusan terkait urusan-urusan produksi dan publik. Tetapi Uni Soviet yang dipimpin Lenin sebenarnya jauh dari apa yang dimaksud dengan "soviet" yang sebenarnya. Segera setelah Bolshevik berkuasa, soviet-soviet tersebut segera ditundukan dengan pemerintahan yang tersentralisir. Kekuasan soviet-soviet tetap bertahan beberapa tahun, dan Bolshevik membutuhkan kerja keras untuk membalik alur perintah dari bawah (*bottom-up*) ini menjadi dari atas (*top-down*).

Untuk kota-kota besar, pembentukan federasi bisa dibentuk dari kampus masing-masing, kemudian dilakukan pertemuan besar untuk membentuk federasi kota, terutama jika terlalu calon anggota dianggap terlalu banyak. Namun jika jumlah calon anggota dianggap terlalu sedikit, maka satu konfederasi tanpa desentralisasi saja sudah sangat baik di masing-masing kota, termasuk di kota-kota besar. Ini juga lebih realistis.

Bagian 4

Pejabat

Para anarkis, yang menolak segala otoritas (baca: kekuasaan), kerap tergelincir untuk memaknai bahwa kebebasan yang hendak dicapai berarti berdiri tanpa kekuasaan sama sekali. Padahal bukan, itu bahkan bukan anarkisme. Yang jelas-jelas ingin dicapai adalah mencoba menghancurkan kekuasaan segelintir orang atas dirinya, atas hidupnya, dan memegang kendali penuh kekuasaan, langsung di tangan masing-masing. Alih-alih menghancurkan dan meniadakannya, ia bermaksud untuk merebutnya, bukan untuk

melanjutkan proses kekuasaan atas yang lain, tapi kekuasaan mutlak diri untuk menuju kebebasan. Kebebasan diri, atau kedirian yang sempurna, hanya akan tercipta jika seseorang punya kekuasaan atas dirinya sendiri. Kekuasaan atas orang lain berarti menggagalkan kebebasannya, sebab bagaimanapun juga, kebebasan di bawah kekuasaan orang lain bukanlah kebebasan. Demikianlah kita mula-mula harus menyadari bagaimana korelasi positif antara kekuasaan dan kebebasan.

Hal ini yang tidak bisa ditangkap oleh oposisi anarkisme. Bagi mereka, kebebasan itu mutlak diberikan dan perlu dijamin oleh kekuasaan. Karena itu penting bagi mereka untuk menjaga *status quo* kekuasaan, untuk mempertahankan pondasi kestabilan dan kemapanan sistem, serta merebut kekuasaan atas orang lain tersebut, salah satunya dengan pemilihan umum. Asumsi dasar yang mereka percayai adalah jika kita memilih dengan tepat, maka penguasa yang baik akan memberikan dan menjamin kebebasan. Bukankah ini konyol, mengingat tidak ada satu manusia pun yang sempurna di dunia, dan karena penguasa adalah manusia, maka dengan demikian tidak ada kebebasan yang sempurna pula dari penguasa yang tidak sempurna tersebut? Namun mereka malah mentolerir hal ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dan layak diterima, tanpa mempertimbangkan adanya pilihan-pilihan lain yang sebenarnya jauh lebih masuk akal dan manusiawi. “Pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa,” ujar Frans Magnis Suseno, yang dengan lancang mengeluarkan pernyataan kompromis macam ini. Jika demikian, apalagi yang dibutuhkan dari penguasa jika mereka memang tidak mungkin memberikan yang asasi dari setiap manusia, yaitu kebebasan?

Pemimpin vs Penguasa

Setiap otoritas, atau mereka yang berkuasa pasti menjadi pemimpin. Namun pemimpin yang sejati, yang dirinya kuat, pintar dan baik hatinya, tidak memerlukan otoritas untuk mendapatkan dan

mengarahkan pengikut. Saya heran pula dengan kebanyakan anarkis yang juga tergelincir dalam memahami hal ini. "Kata pemimpin," ujar dedengkot anarkis Murray Bookchin, "tidak mesti membuat kita takut untuk mengenali bahwa sejumlah individu memang memiliki lebih banyak pengalaman, kedewasaan, perkembangan karakter dan sebagainya ketimbang orang-orang lainnya." Menurut Bookchin, menolak perbedaan ini dan mengatakan bahwa setiap orang berada pada tingkat pengetahuan, pengalaman dan penglihatan yang sama adalah mitos tidak masuk akal yang digugurkan oleh realitas kehidupan sehari-hari dan biologis. Tidak ada tirani yang lebih halus daripada "tirani ketiadaan struktur," yang juga bisa mencakup tirani interpretasi palsu atas kesetaraan, yakni bahwa kita semua berpengetahuan sama. Ada perbedaan besar antara mengatakan bahwa kita semua berpengetahuan sama dan mengatakan bahwa kita semua mampu secara potensial, belajar dan berbagi pengetahuan dengan landasan egaliter.

Namun pemimpin yang sejati, yang dirinya kuat, pintar dan baik hatinya, tidak memerlukan otoritas untuk mendapatkan dan mengarahkan pengikut.

Dengan ini kita harus membedakan dulu antara penguasa (*authority*) dan pemimpin (*leader*). Anarkisme terang-terangan menolak otoritas, sebuah posisi dominasi kepemimpinan yang tiran dan elitis, eksistensi hierarki yang jelas dengan perintah dan keputusan yang koersif, diiringi dengan sanksi terhadap ketidakpatuhan dan pembangkangan. Anarkisme, sebaliknya, mengakui kebebasan individu serta menolak kepercayaan mutlak, yang menurut dedengkot anarkis lainnya, Mikhail Bakunin, akan memadamkan nalar dan keberhasilan jerih payah kita, dan mengubah kita menjadi "budak belian, alat bagi hasrat dan kepentingan orang lain."

Otoritas bermakna sangat luas. Dalam bentuk tertentu, kita tidak bisa benar-benar dapat menghapus otoritas itu. Anarko-kristen

misalnya, mengakui bahwa satu-satunya otoritas adalah Tuhan dan menolak patuh terhadap institusi-instusi agama dan negara, bahkan negara agama sekalipun. Kita tidak dapat menyangkal bahwa ada beberapa orang punya pendapat yang lebih otoritatif pula, seperti insyinyur dan dokter. Namun "otoritas" ini bersifat profesional, dan saran atau perintahnya kita patuhi (atau tidak), karena mereka memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidangnya.

Namun pemimpin, tidak memerlukan kewenangan untuk memberikan pengarahan dan meyakinkan orang banyak untuk melakukan apa yang terbaik bagi mereka. Seorang anarkis sekalipun akan menyetujui, atau melaksanakan permohonan seorang bukan karena ia harus tunduk, tapi karena ia sukarela dan setuju. Jika ia tidak sukarela dan tidak setuju, maka tidak perlu dipenuhi. Ia patuh atas kehendak bebas dan kediriannya, inilah anarkisme.

Sekali lagi, kita tidak dapat mengelak bahwa dalam masyarakat, akan terdapat pemimpin, termasuk dalam organisasi anarkis sekalipun, karena kemampuannya dalam mengorganisir, pengetahuan serta keseberhajaannya. Kita tidak boleh mematikan inisiatif atau kecenderungan dominan dalam pengambilan keputusan terhadap mereka, tetapi keputusan tetap diambil secara rasional.

Pejabat Federasi

Kita sudah membedakan antara penguasa dan pemimpin, sekarang kita harus membahas soal pejabat-pejabat di dalam federasi. Pejabat dalam artian administratif perlu dibedakan dengan otoritas. Dalam banyak praktik masyarakat anarkis, kita bisa melihat bahwa majelis, dewan atau komune memiliki pejabat-pejabat mereka. Bahkan Bakunin sendiri menulis bahwa "rakyat memiliki *common sense* yang sehat dan praktis tatkala menjalankan urusan-urusan komunal. Mereka hampir memahami dan tahu betal bagaimana memilih para pejabat yang berkemampuan di tengah-tengah mereka. Karena inilah pemilihan-pemilihan munisipal selalu dengan baik merefleksikan sikap dan kehendak rakyat."

Tetapi, pejabat-pejabat federasi jelas akan jauh berbeda dengan apa yang kita maksud dengan pejabat dalam organisasi kenegaraan. Pejabat federasi bahkan bukanlah otoritas, sebab menangani urusan administrasi dan teknis belaka. Ia akan ada dalam unit terkecil dari federasi. Jika federasi mahasiswa di suatu kota akan didesentralisasi hingga aras fakultas, maka pejabat ini wajib ada di unit fakultas. Jika federasi tidak didesentralisasi, maka federasi kota itu juga wajib memiliki pejabat.

Federasi membutuhkan beberapa posisi yang tidak mungkin tidak ada, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara dengan masa jabatan yang ideal adalah satu tahun. Namun untuk dua yang terakhir, kita tidak perlu menjelaskan alasannya lebih lanjut. Tetapi untuk ketua, mungkin akan ada beberapa anarkis yang akan segera menolaknya. Tapi kita harus sadar bahwa ada tiga tugas yang harus di isi: 1) memimpin rapat, 2) mewakili federasi dalam pertemuan-pertemuan eksternal, dan 3) menjadi narahubung organisasi.

Bisa saja tugas ini langsung dibagi, sehingga tidak memerlukan ketua. Sebagai contoh, untuk narahubung, EZLN di Chiapas, Mexico memiliki sub-commandante. Walau jabatan itu disebut sebagai komandan, ia tidak memiliki otoritas dalam hierarki EZLN dan tidak dapat memerintah. Sementara itu Earth First! di Amerika memiliki juru bicara untuk mewakili organisasi tersebut ke hadapan pemerintah atau media.

Untuk memimpin rapat, *eklesia* di Yunani melakukan undian bergilir. Cara ini dirasa demokratis, tapi tidak semua orang punya kemampuan berbicara di depan publik dengan baik, atau mengarahkan berjalannya rapat. Sehingga ketua hanya menjabat selama beberapa jam atau beberapa hari. Ketua yang dipilih misalnya, pasti dipilih karena pertimbangan atas kemampuan memimpin rapat.

Sementara untuk mewakili pertemuan, kita bisa mencontoh organisasi kebudayaan Taring Padi di Yogyakarta. Mereka membuat daftar gilir untuk mewakili Taring Padi ke pameran-pameran atau kegiatan yang membutuhkan perwakilan keluar negeri. Sebab jika hal

ini tidak diatur, maka akan ada kecemburuan didalamnya. Orang-orang yang berada di daftar paling atas akan berangkat duluan, dan jika sudah menyelesaikan urusannya, namanya akan ditaruh di barisan paling bawah. Begitu seterusnya sehingga setiap anggota akan memiliki kesempatan untuk mewakili organisasinya. Namun hal ini dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang eksklusif, atau anggap saja, kegiatan yang bisa memancing perpecahan di dalam organisasi.

Sekretaris dan bendahara tetap diperlukan, namun untuk ketua, hal ini harus diputuskan oleh federasi kota masing-masing, atas kesepakatan mereka tentu saja. Jika federasi kota didesentralisir, maka bisa dipertimbangkan untuk membentuk pejabat federasi kota.

Bagian 5

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan dalam unit paling kecil dari federasi, melalui praktik demokrasi langsung dengan mengutamakan konsensus, atau yang kita kenal sebagai musyawarah untuk mufakat. Konsensus adalah alternatif pengambilan suara yang dianggap rasional dan menjaga otonomi pribadi. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka perdebatan harus dihidupkan dengan mengutarakan alasan-alasan mendukung atau menolak. Jika dianggap terlalu runyam, maka papan tulis akan sangat berguna untuk mendaftar poin-poin keberatan. Jika poin tersebut bisa dipatahkan dan diberikan solusinya oleh pendapat lawan, maka ia dicoret. Usulan dengan poin yang dicoret paling sedikit tentu saja adalah solusi yang paling baik, walau tentu bukan saja yang terbaik. Bahkan jika perlu, hal-hal paling teknis juga bisa dibahas untuk menunjang pembenaran suatu usulan, hingga semuanya sepakat untuk sepakat.

Jika konsensus gagal dicapai, pemungutan suara (*voting*) dilakukan dengan keputusan yang diambil berdasarkan aturan suara mayoritas, yakni sedikitnya 51 persen mendukung, maka hasilnya akan disahkan. Namun sebisa mungkin, pemungutan suara harus dihindari, sebab mayoritas tidak lebih berhak untuk mendikte minoritas, bahkan minoritas yang terdiri dari satu orang sekalipun, demikian pula sebaliknya minoritas terhadap mayoritas. Ia justru bisa mengarah kepada *dictator by majority*, terutama jika terdapat kubu-kubu "tanpa bentuk" di dalam federasi.

Dalam konsensus, *isegonia*, hak universal untuk berbicara di dalam pertemuan, perlu dijunjung tinggi. Semua segi isu, argumen

dan kontra-argumen akan diperdengarkan selengkap mungkin. Federasi menjanjikan kebebasan yang tidak hanya mengijinkan debat, tetapi mengembangkannya. Federasi adalah institusi dimana forum-forum diskusi dan debat akan terbuka bagi ekspresi sepenuhnya dari semua sudut pandang.

Konsensus memiliki poin kelebihan, yaitu lebih sesuai dalam federasi yang anggotanya sangat akrab satu sama lain. Namun dalam pertemuan yang lebih heterogen, perkelahian bisa saja terjadi, dan ini menjadi permasalahan serius. Bagaimanapun juga, cara yang lebih bermoral adalah ketika suatu keputusan sudah disahkan, ia juga harus dibarengi peluang mengubah keputusan pada masa mendatang. Mereka yang merasa pendapatnya kalah, perlu membangun kontra-argumentasi disertai dengan bukti-bukti bahwa pendapatnya benar dan tepat, serta menghancurkan pendapat lawan, dalam pertemuan selanjutnya. Sebab suatu keputusan yang mengikat dan bersifat tetap dalam jangka waktu lama adalah tidak mungkin. Situasi dan kondisi menentukan bagaimana kita berpikir dan bertindak, perubahan situasi akan membawa perubahan terhadap cara kita berpikir dan bertindak pula.

Federasi menjanjikan kebebasan yang tidak hanya mengijinkan debat, tetapi juga mengembangkan nya.

Bagaimanapun juga saya percaya bahwa konsensus, kemungkinan besar bisa terus dicapai dalam banyak situasi dan kondisi. Akan aneh jika konsensus sulit tercapai. Jika demikian, maka hal yang sedang dibahas itu perlu ditinjau kembali. Apakah memang hal tersebut memang perlu dibahas? Jangan-jangan justru hal tersebut malah mengganggu kebebasan anggotanya atau bertentangan dengan tujuan federasi.

Delegasi vs Representasi

Saya sudah menjelaskan bahwa pengambilan keputusan harus diambil dari unit paling kecil dalam federasi karena sifat otonomnya. Untuk aras yang lebih tinggi, terkadang pengambilan keputusan akan diperlukan. Jika federasi sudah terlalu besar, akan menjadi mustahil untuk mengadakan pertemuan yang benar-benar efektif dan efisien. Itu bukan rapat, tapi mimbar bebas penuh orasi-orasi ngalur-ngidul saja. Dalam hal inilah sistem perwakilan terkadang dibutuhkan.

Soal sistem perwakilan ini, kita harus membedakan antara representatif dan delegasi. Sistem kenegaraan menggunakan representatif, sehingga walaupun mengaku membawa suara rakyat, sebenarnya itu tetaplah suara mereka dan kelompoknya. Suara mereka akan dianggap sebagai suara rakyat sebegitu saja. Hal ini yang sebisa mungkin kita tolak.

Sebaliknya, delegasi berarti utusan yang memang membawa mandat. "Mandat" di sini bukan berarti tugas untuk mewakili, tetapi membawa pesan-pesan tertentu yang sudah jelas dan sudah disepakati bersama (konsensus) dari kelompok yang diwakilinya. Di berbagai praktek demokrasi langsung, pembawa mandat bahkan dikawal untuk memastikan bahwa ia memang menyampaikan sesuai dengan hasil keputusan. Jika dianggap menyeleweng, maka delegasi dapat di-*recall*. Inilah demokrasi, inilah pemerintahan dari bawah, pemerintah rakyat yang sesungguhnya. Ini pula yang hendak kita wujudkan dalam masyarakat, ketika politik bukanlah urusan elit-elit profesional, tetapi para amatir, para warga biasa yang berdaulat.

Pertama-tama, usulan suatu unit dilemparkan ke pejabat federasi kota. Tiap sebelum rapat, pejabat akan menyusun bermacam persoalan dan isu yang diminta untuk dirundingkan dalam pertemuan federasi kota. Agenda itu diumumkan paling lambat seminggu sebelum pertemuan, agar unit-unit yang kecil itu mempunyai waktu untuk menyusun kontribusi yang akan diberikan pada diskusi mengenai isu tersebut. Isu tersebut harus spesifik, sehingga pertimbangan yang muncul akan spesifik pula.

Misalnya, unit federasi mahasiswa UNY memutuskan bahwa federasi kota di Yogyakarta perlu turun tangan dalam advokasi dan pengorganisiran kasus agraria di Gunung Kidul dalam menghadapi rezim feodal Sultan. Usulan yang diumumkan adalah: ayo kita turunkan sultan dan bentuk komune demokratik di Yogyakarta! Unit di UAD bisa saja menolak, tetapi itu harus disepakati bersama dalam pertemuan di unit tersebut, lalu menyampaikannya dalam pertemuan. Hal yang perlu diingat adalah, hal ini tentu saja tidak akan menghalangi anggota unit di UAD, untuk secara individual terlibat dalam pemberontakan. Ada beberapa hal yang sifatnya mengikat dan tidak. Untuk kasus ini, keputusan unit di UAD tidak boleh mengikat.

Terkadang, ada beberapa konteks yang sangat mendesak dimana kita harus menggunakan sistem representatif. Misalkan, seorang mahasiswa anarkis sedang diburu, atau buruknya lagi ditangkap oleh tentara, keputusan perlu diambil saat itu juga. Apakah perlu melakukan aksi langsung dengan melakukan penyerbuan untuk membebaskan dia atau tidak? Pertemuan diadakan tanpa perlu memandang apakah ia delegasi dari unitnya atau bukan, dan ia harus mengumumkan hasil keputusan ke unitnya lagi.

Bagian 6

Kongres

Untuk kongres, saya kira sangat penting untuk melihat kembali bagaimana kamerad kita melakukan ini lebih dari satu abad yang lalu sebagaimana dicatat oleh Errico Malatesta. Kongres organisasi anarkis, terlepas dari semua kekurangannya akibat sifatnya sebagai badan-badan perwakilan, sebenarnya bebas dari segala bentuk keotoriteran karena badan-badan tersebut tidak menetapkan aturan atau tidak memaksakan hasil musyawarah mereka pada pihak lain. Badan-badan tersebut berfungsi untuk memelihara dan meningkatkan kontak personal di antara kamerad-kamerad yang paling aktif, untuk meringkas dan mendorong pembelajaran-

pembelajaran programatik terhadap cara dan sarana tindakan; untuk mengenalkan setiap orang dengan situasi dan keadaan di wilayah tertentu dan jenis tindakan yang paling diperlukan dan mendesak; untuk meringkas beragam aliran pandangan anarkis pada waktu tertentu dan oleh karenanya mempersiapkan beberapa jenis statistik mengenai ragam aliran tersebut.

Keputusan-keputusan badan-badan ini tidaklah mengikat, namun sekadar anjuran, nasihat dan proposal kepada semua yang berkepentingan, dan keputusan tersebut tidak mengikat dan wajib dilaksanakan kecuali bagi pihak yang menyepakatinya dan selama mereka masih menyepakatinya. Organ-organ administratif yang mereka angkat -Komisi-komisi Korespondesi, dll– tidak memiliki kekuasaan untuk mengarahkan, tidak melakukan inisiatif kecuali bagi pihak-pihak yang memintanya atau menyetujuinya secara spesifik, dan tidak memiliki otoritas untuk memaksakan pandangannya sendiri, yang tentu dapat mereka junjung dan dipropagandakan sebagai kelompok-kelompok seperjuangan, namun tidak dapat diajukan sebagai pandangan resmi organisasi. Badan-badan ini menerbitkan resolusi-resolusi dari kongres-kongres, dan pendapat serta proposal yang disampaikan oleh kelompok-kelompok dan individu-individu; dan badan-badan ini bertindak bagi pihak yang ingin menggunakan keberadaannya, untuk memfasilitasi hubungan antar kelompok, dan kerja sama antara pihak-pihak yang bersepakat dalam beragam inisiatif; setiap pihak bebas untuk berhubungan dengan siapa pun yang dikehendakinya secara langsung, atau menggunakan komite-komite lain yang diangkat oleh pengelompokan-pengelompokan yang spesifik.

Kongres dan Tujuan Jangka Menengah

Kongres harus serupa demikian bagi federasi mahasiswa anarkis ini. Tetapi jauh sebelum melakukan itu, kita perlu menetapkan *platform* bagi federasi. Tujuan jangka panjang (tuntutan maksimum) federasi tidak lain adalah terbentuknya masyarakat

berdasarkan prinsip sosialis libertarian dalam bentuk swa-pemerintahan, melalui demokratisasi radikal pemerintahan munisipal dengan pembentukan majelis-majelis warga yang terdesentralisir; dan penguasaan alat-alat produksi yang berada di bawah kendali kelas pekerja untuk memenuhi kebutuhan semua manusia. Sebagai sebuah organisasi sosialis libertarian, hal itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Kita tidak perlu lagi memasukan aspek ekologi, gender dan seksualitas, agraria, spiritual dsb, sebab perubahan fundamental pada dua tuntutan maksimum pada bidang ekonomi-politik itu akan berpengaruh signifikan terhadap yang lain.

Federasi mahasiswa libertarian adalah organisasi yang revolusioner, bukan gerakan reformis dan bertujuan mereformasi sistem yang ada melainkan mengggantinya dengan sistem yang membebaskan. Namun bukan berarti bahwa tuntutan maksimum tersebut bisa langsung dicapai, seolah-olah revolusi terjadi besok. Karena itu *platform* juga harus mengajukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Malah *platform* mesti sekalian mengapungkan serangkaian tuntutan mendesak yang spesifik dan terang, serta menempatkannya dalam konteks radikal dengan cara mengaitkannya dalam kerangka tujuan jangka panjang yang hendak mengubah masyarakat secara fundamental.

Tujuan jangka menengah mau tidak mau harus dilakukan secara masif, kompak, tersebar, dan berskala luas.

Nah, tujuan jangka menengah tidak lain adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Inilah yang harus dibahas oleh kongres federasi yang dilakukan secara berkala, sebab tujuan jangka menengah mau tidak mau harus dilakukan secara masif, kompak, tersebar, dan berskala luas. Ia adalah pembahasan-pembahasan yang kemudian hasil dari

itu akan diterapkan, dipraktikkan dan dikampanyekan oleh unit-unit yang lebih kecil dalam federasi, yaitu di aras kota.

Tujuan jangka menengah tidak lain adalah tuntutan-tuntutan yang realisasinya diperhitungkan bisa dicapai dalam sistem yang sedang berjalan. Tuntutan-tuntutannya harus spesifik dan kongkrit. Tujuan jangka menengah mesti dirumuskan sedemikian rupa sehingga bergerak menjurus atau berada dalam satu tahapan ke arah tuntutan maksimum. Dengan mengaitkannya seperti ini, program juga mencakup tuntutan-tuntutan transisional bagi penciptaan dan perluasan alternatif-alternatif sosial. Tujuan jangka menengah juga harus menarik massa lebih banyak banyak untuk bergabung dalam federasi, atau walaupun tidak bergabung, punya visi yang sama dengan tujuan jangka panjang kita. Karena itu tujuan jangka menengah kita harus dipahami seluas-luasnya oleh publik paska-kongres.

Sebagai contoh, memperjuangkan pendidikan gratis sebagaimana kamerad mahasiswa anarkis kita lakukan di negara-negara Amerika Latin. Pendidikan gratis jelas akan menarik simpati publik, sehingga federasi akan mendapatkan dukungan tidak hanya dari mahasiswa, tetapi juga keluarganya, terutama keluarga kelas pekerja. Selain itu, tujuan ini akan membuat massa mahasiswa bergabung dengan federasi. Namun yang paling penting adalah, terutama jika tujuan jangka menengah ini tercapai, maka ia akan memompa semangat untuk mendesak terciptanya tuntutan-tuntutan maksimum. Federasi akan menjadi kekuatan revolusioner yang diperhitungkan. Contoh lain adalah revolusi agraria, yaitu penguasaan mutlak petani atas tanah. Sebagai negara agraris, kaum tani tidak bisa tidak akan menjadi kekuatan revolusioner di samping kelas pekerja, sebagaimana kita bisa melihat perannya pada detik-detik menjelang Revolusi Rusia 1917.

Tujuan jangka menengah ini adalah inti dari kongres. Kongres menjadi berfungsi karena kita tetap memerlukan isu bersama untuk mengikat kekompakan kita dan meningkatkan solidaritas. Setelah delegasi dari federasi kota akan membawa usulan, aspirasi, dan topik-

topik baru di dalam kongres. Kongres akan membahas untuk menyetujuinya atau tidak, melakukan otokritik terhadap gerakan, serta memikirkan metode-metode yang baru.

Ratifikasi

Sebagai bagian yang otonom dari federasi mahasiswa, unit-unit paling kecil jelas punya kedaulatan untuk membuat pertimbangan secara rasional untuk memenuhi hasil kongres. Lagipula, konteks yang berbeda pada situasi dan kondisi di masing-masing wilayah menuntut unit paling kecil untuk melakukan penyesuian. Inilah fungsi ratifikasi. Segala ketetapan dan seruan yang dikeluarkan sebagai hasilnya, tidak lain akan menjadi panduan, yang harus disesuaikan dengan konteks federasi lokal.

Misalnya, federasi mahasiswa libertarian nasional memutuskan terlibat dalam gerakan petani dalam konflik-konflik agraria untuk pemenuhan hak petani atas tanah. Bagaimana dengan mahasiswa yang dikelilingi oleh area industri misalnya? Bukan berarti kongres tidak perlu membahas hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh suatu federasi tertentu. Hasil kongres bersifat tetap, namun tidak bersifat mengikat. Ia akan menjadi anjuran, seruan, dan panduan, karena federasi kota perlu menyesuaikan pula dengan kemampuannya.

Kongres tidak perlu membahas tujuan-tujuan jangka pendek (tuntutan minimum). Biarkan itu menjadi urusan federasi lokal, sesuai dengan konteks, semangat dan kemampuan yang dimilikinya. Tuntutan minimum ini tidak lain adalah program kerja bagi masing-masing federasi kota. Federasi kita memerlukan diverisifikasi metode dan isu. Biarkan misalnya federasi di Semarang juga terlibat dalam advokasi penolakan PLTU di Batang atau penolakan Pabrik Semen di Rembang. Biarkan mereka mengeluarkan penerbitan-penerbitan, diskusi-diskusi, dan aksi-aksi mereka sendiri. Yang pasti, keberagaman itu akan menyatu untuk tujuan jangka panjang.

Apakah kongres perlu mengeluarkan program kerja? Kalau dibutuhkan, kenapa tidak? Yang pasti, program kerja akan banyak terjadi di unit paling kecil dari federasi.

Bagian 7

Program Kerja

Saya sudah menjelaskan bahwa kita membutuhkan platform untuk federasi. Tuntutan minimum tidak lain adalah program kerja yang nyata dari federasi kota. Namun karena program kerja adalah urusan masing-masing federasi, saya tidak perlu banyak ikut campur. Terserah mereka hendak melakukan apa. Namun saya akan memberikan sedikit saran.

Program kerja tidak boleh melanggar prinsip-prinsip federasi. Prinsip-prinsip itulah yang membedakan kita dengan organisasi ekstra-kampus yang lainnya. Ia adalah manifestasi konkret dari ideologi sosialis libertarian. Melanggar prinsip tersebut berarti bertindak kompromis. Tapi, sejak kapan kita tidak boleh berkompromi? Maksud saya, tidak akan ada sanksi terhadap pelanggaran tersebut, apalagi jika mempertimbangkan situasi yang dihadapkan pada masing-masing federasi berbeda.

Sebagai organisasi mahasiswa, maka tidak mungkin pula ia menjadi menara gading yang jauh dari sawah, atau hanya menjadi gading tak berguna saat di tengah-tengah sawah. Ia perlu mengimbangi keduanya, antara kampus dan kampung, antara ruang kelas dan pabrik-pabrik, antara laboratorium dan ruang-ruang kota termarjinalkan. Berpropaganda, kita harus berada di tengah rakyat, dan di dalam asosiasi-asosiasi pekerjalah para pekerja dan serikat-serikat petani, kita menemukan rekan seperjuangan dan khususnya mereka yang paling bersedia untuk memahami dan menerima gagasan-gagasan kita. Kita juga perlu bergerilya di antara kerumunan mahasiswa yang tanpa arah itu, mengagitasi mereka.

Tak dapat dipungkiri bahwa propaganda dan pendidikan publik akan menjadi program setiap federasi. Publik harus mengetahui sedalam-dalamnya mengenai tujuan jangka panjang kita. Gelar "intelektual muda" mungkin akan membuat kesan bahwa diri kita merasa lebih tinggi dan kita memiliki tanggungjawab tertentu. Namun ini seharusnya tidak membuat kita untuk menyangkalnya, justru kita harus menyesuaikan diri dengan predikat tersebut. Publikasi-publikasi harus menunjukan kebenaran ilmiah yang mendalam, argumentasi dari fondasi kokoh, dengan landasan teoritik yang memadai.

Namun, sekalipun kita dapat berpropaganda sebanyak yang kita inginkan pada masyarakat dan teman-teman mahasiswa, upaya ini tidak akan memiliki dampak yang berarti pada mereka selama bahasa dan istilah yang kita gunakan terlalu mengawang-ngawang. Di samping segelintir orang-orang yang lebih terdidik dan memiliki

kemampuan pemikiran abstrak dan entusiasme teoritis, para pekerja tidak dapat mencerna dan sampai pada anarkisme hanya dengan sekali-dua kali interaksi. Ia harus jelas tanpa melakukan penyederhanaan yang berlebihan. Karena itu yang paling penting: praktek!

Pemerintahan Mahasiswa

Lembaga kemahasiswaan akan menjadi laboratorium yang menarik untuk menciptakan masyarakat kampus yang anarkis. Jika mahasiswa melihat dan mengalami langsung praktik egalitarian dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan mahasiswa (*student government*), maka ia akan menjadi propaganda yang lebih efektif ketimbang menempel poster dan membagikan selebaran. Apakah bisa? Kita tidak tahu, tetapi kenapa tidak mencobanya?

"

Jika mahasiswa melihat dan mengalami langsung praktik egalitarian dalam pengambilan keputusan pada pemerintahan mahasiswa (*student government*), maka ia akan menjadi propaganda yang lebih efektif ketimbang menempel poster dan membagikan selebaran.

Contoh menarik pernah dilakukan oleh kamerad-kamerad di UGM dalam upaya gagalnya membubarkan BEM KM UGM dan menggantikannya dengan swa-pemerintahan mahasiswa (*student self-government*), yaitu pemerintahan dari bawah, langsung oleh mahasiswa. Pembubaran itu tentu saja gagal, sebab mereka tampaknya tidak membangun basis massa mahasiswa yang kuat di tingkat rumput. Jika mereka sudah berhasil membangunnya, maka ia akan menjadi apa yang disebut oleh Murray Bookchin sebagai kekuatan ganda (*dual power*) terhadap kekuasaan

lembaga kemahasiswaan formal. Di saat itulah, mungkin saja, walau belum mempunyai kekuatan politik yang resmi, ia punya kekuatan moral untuk mempengaruhi lembaga kemahasiswaan dari luar. Sehingga, cepat atau lambat, lembaga kemahasiswaan akan tunduk di bawah majelis mahasiswa demokratik, atau bubar dengan sendirinya.

Sementara itu, penghancuran dari dalam pernah dilakukan oleh kamerad kita di Untidar, Magelang. Ya, seorang mahasiswa anarkis, Krisnaldo Triguswinri berhasil merombak ulang tata pemerintahan mahasiswa segera setelah ia menjabat sebagai Ketua BEM. Walau hanya bertahan satu tahun, ini bukti eksperimen yang berhasil. Hebatnya, justru dari dalam. Berdasarkan dari diskusi dengan mereka, saya bisa mendengar bagaimana upaya mobilisassi mahasiswa menjadi sangat masif, bahkan walau tanpa adanya kekuatan yang tersentralisir yang elitis. Sayang, kabar baik ini tidak segera menyebar, macam revolusi yang senyap. Saya tidak tahu penyebab kegagalan tersebut. Namun tampaknya mereka bermasalah dengan sistem perwakilan.

Eksperimen di Untidar mungkin bisa dianggap sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip-prinsip anarkisme. Namun, elektoral dan negara adalah dua hal yang berbeda. Janet Biehl, murid dan rekan Bookchin, dalam bukunya *Politik Ekologi Sosial – Munisipalisme Libertarian*[1] yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa gagasan Bookchin ini harus dipahami dengan membedakan antara bidang politik, sosial dan negara. “Partisipasi dalam pemilihan munisipal dan dewan kota,” tulis Biehl, “hampir berbeda dengan Ke-Negara-an, terutama ketika gerakan libertarian secara sadar mengarahkan partisipasi ini menentang Negara.” Penentangan terhadap negara memang sangat diharuskan, tetapi

---

[1] Biehl mengakui bahwa karya-karya Bookchin terbit di media-media yang susah ditemukan, dan pada banyak hal sangat susah dipahami. Oleh karena itu Janet Biehl melalui buku tersebut berupaya merangkum dan mengartikulasikan pemikiran Bookchin, tanpa bermaksud untuk menafsirkan, menganalisa atau menilainya.

statisme (sikap mendukung negara) bukan hal yang sama dengan elektoralisme. Karena itu, menggunakan jalur pemilihan untuk menghancurkan negara bukanlah cara yang harus dihindari.

Bentuk pemerintahan mahasiswa macam apa yang kita inginkan, bisa kita diskusikan nanti, saya hanya fokus mengenai pandangan anti-elektoral yang banyak dianut anarkis saat ini. Sikap anti-elektoral pernah direfleksikan ulang rekan-rekan anarkis Spanyol kita. CNT-FAI pernah menyerukan anggotanya untuk ikut dalam pemilihan dan membentuk pemerintahan koalisi pada 1937 dan berbagai konsesi yang mereka berikan untuk memperkuat komunis demi tujuan perang di Spanyol. Selain itu, banyak anarkis di Amerika yang mendukung politis Bernard Sanders, yang membawa aspirasi anarkisme dan menghancurkan sistem dari dalam.

Tetapi tentu saja membandingkan kampus dengan negara adalah jelas suatu kesalahan. *Pertama*, pemerintahan mahasiswa bersifat lokal, karena itu segala pejabat-pejabatnya bisa dikontrol dan diawasi langsung oleh mahasiswa. Berbeda dengan negara, dengan segala perangkat dan administrasi yang membuatnya menjadi tidak terjangkau oleh rakyat, pemerintah yang sebenarnya. *Kedua*, pemerintahan mahasiswa tidak memberikan banyak peluang yang membuat pejabat mahasiswa menjadi korup, dan karena mendapat kontrol yang ketat dari atas, yaitu pejabat rektorat. Sementara itu negara adalah instrumen kekuasaan yang mengatur sumber daya yang sangat besar, tidak ada yang mengontrol lagi kecuali perjanjian internasional dan korporasi-korporasi. Godaan bagi politik kenegaraan jauh lebih hina, kotor, dan rusak. Sementara politik kampus, dengan semangat yang membara dan idealisme, jauh dari huru-hara macam itu.

Karena itu, upaya membentuk swa-pemerintahan mahasiswa dengan swa-pemerintahan yang sesungguhnya jelas berbeda. Namun ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa untuk membawa perubahan yang sama ke dalam masyarakat. Ini juga bentuk tertinggi propaganda dengan perbuatan (*propaganda by the deed*).

Di Tengah-Tengah Masyarakat

Untuk menjadi anarkis yang teguh, dan bukan hanya sekedar slogan, para pekerja harus mulai merasakan solidaritas yang menyatukan mereka dengan rekan seperjuangannya, dan belajar bekerjasama dengan orang lain untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan, dengan berjuang melawan para bos dan pemerintah di belakangnya, para pekerja harus menyadari bahwa bos dan pemerintah adalah parasit yang tak berguna dan bahwa para pekerja dapat mengelola ekonomi domestiknya dengan upaya dan kemampuannya sendiri.

Saya punya pengalaman indah saat aksi pemasungan kaki petani Rembang di pusat kekuasaan republik, depan Istana Merdeka. Puluhan petani dari Pegunungan Kendeng mencor kaki mereka dengan semen, dan menolak membongkarnya bahkan walau jari-jari kaki mereka terluka dan membengkak. Mereka sebisa mungkin bertahan hingga pabrik semen benar-benar dibatalkan. Ini langkah paling akhir dan putus asa dari beragam cara dalam perjuangan panjang mempertahankan pegunungan kendeng dari eksavator kapital yang hendak mengeruk karst.

Semua lembaga dan perorangan, secara kolektif bersolidaritas memberikan segala bantuannya. LBH Jakarta menyediakan tempat menginap bagi petani. Beberapa organisasi, mulai dari serikat buruh hingga organisasi lingkungan menyediakan pikap untuk transportasi. Mereka yang tidak dapat hadir, menggalang dana melalui rekening, dan pesan penggalangan disebar ke grup-grup chat dan media sosial. Uang hasil penggalangan dana tersebut kemudian dibelikan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya. Sementara mereka yang tidak bisa memberikan bantuan keuangan dan barang, memberikan tenaga fisik mereka yang dengan bersemangat mengangkut petani-petani yang dicor kakinya untuk pulang-pergi Monas. Tanpa bermaksud meromantisir, otot-otot kelas pekerja –salah satunya dari serikat buruh transportasi kapal- membuat proses pengangkutan logistik dan

petani menuju Monas dan sebaliknya menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan.

Tidak sampai di situ, ada beberapa tindakan-tindakan kecil lain yang penting dan tidak kalah berarti. Seperti seseorang memberikan salak dan semangka kepada petani. Aktivis lingkungan mengumpulkan sampah dan menyediakan air isi ulang untuk meminimalisir penggunaan botol plastik air mineral sekali pakai. Aktivis buruh, seniman, petani dari berbagai daerah, mahasiswa, keluarga korban 98 dan penyelenggara kamisan, semuanya secara bergilir memberikan orasi solidaritasnya. Sementara seorang teman yang lain, bukan jurnalis media, tapi fotografer handal, mengabadikan momen-momen aksi dan mengunggahnya ke internet. Selebihnya, di kala senja, Marjinal memainkan musik yang memberikan semangat dan penghiburan di kantor LBH Jakarta.

Keramaian tersebut juga terjadi di dalam telepon seluler saya. Saya punya empat grup chat besar dengan orang-orang dan tujuan tertentu dan semuanya ramai dengan hiruk pikuk aksi petani Kendeng. Pesan-pesan penggalangan dana dengan penanggungjawab dan nomor rekening berbeda-beda, hasil rapat para relawan peserta aksi, barang-barang yang dibutuhkan petani, serta gambar hasil swa-foto tersebar di grup-grup tersebut.

Setiap orang punya kebebasan untuk membantu sesuai dengan kemampuan dan keinginannya. Di dalam anarkisme, ini adalah bentuk perayaan individualitas paling tinggi. Kebebasan tidak dipandang sebagai konsep filosofis abstrak, melainkan peluang konkret vital bagi setiap manusia untuk mengembangkan sepenuhnya segala daya, kapasitas, dan talenta yang telah diberikan alam kepadanya, dan mengubahnya menjadi potensi yang sejati.

Hal menarik lainnya dari aksi petani Kendeng adalah tidak adanya hirarki atau otoritas tertentu yang terpisah dan berkuasa kepada kelompok sukarelawan yang lain. Semuanya berjejaring dengan kolektif akar rumput, tanpa sebuah kewenangan yang tersentral. Sepulang aksi dari istana, perwakilan petani dan JMPPK, dari berbagai macam kelompok, melakukan pertemuan untuk

mengevaluasi hasil aksi pada hari itu dan merencanakan aksi untuk keesokan harinya di lantai tiga kantor LBH Jakarta. Pengambilan keputusan dilakukan secara egalitarian dengan mengutamakan konsensus. Sementara di lantai bawah, terhampar petani-petani Kendeng sedang beristirahat seperti setumpuk ikan pindang di pasar. Didekatnya terdapat dapur umum tempat kebutuhan konsumsi dilakukan dengan bahan pangan yang disumbangkan dari berbagai individu atau organisasi.

Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan negara –salah satu institusi hirarkis yang menindas- dimana pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung pada kehidupan orang banyak terletak pada segelintir orang. Ini bertentangan dengan hasrat alamiah kebebasan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Begitu pula dengan metode kepartaian yang biasa dipakai oleh kelompok kiri orthodoks, ketika nasib untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi kelas pekerja justru sangat bergantung pada elit partai dan perwakilan pekerja di parlemen.

Jelas sekali bahwa fenomena ini terjadi bukan karena secara teoritis mereka –pendukung dan petani Kendeng- memiliki pemahaman anarkisme, tetapi karena keterbatasan sumber daya tentunya, yang memancing aktor-aktornya untuk memikirkan cara supaya gerakan petani Kendeng bisa bertahan dan berkelanjutan. Keberhasilan taktik gerakan sosial yang mampu memicu solidaritas sangat luas ketimbang kebanyakan gerakan lain yang bergerak dengan taktik konvesional, membuat dukungan dan bantuan sumber daya dari beragam kelompok kepada petani Kendeng mengalir deras. Dukungan dan bantuan yang luar biasa tidak dapat lagi dikelola dengan cara-cara biasa. Sementara JMPPK sangat kelelahan mengurus gerakan dan beberapa sumber daya yang masuk, masih banyak lagi hal-hal yang tidak dapat mereka kelola sendirian. Karena itu membiarkan 'yang lain' berjalan sendiri-sendiri secara swa-kelola tetapi sesuai dengan tujuan yang diinginkan adalah langkah yang sangat tepat sekali.

Dari kesemuaannya itu, hanya satu yang kurang anarkis, pandangan bahwa mereka masih memerlukan negara untuk mencapai tujuan mereka. Agak ironis untuk menyaksikan bagaimana metode-metode anarkis terjadi untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama sekali dihindari anarkisme. Mereka masih mengemis kepada negara, meminta belas kasihan, setelah sebuah hirarki koersif maha besar yang bernama negara itu menginjak-nginjak mereka, membakar tenda perlawanan, dan melakukan perusakan permanen pada tubuh ibu bumi? Kalau saya tidak sudi.

Kebebasan, pengambilan keputusan non-hirarkis yang egalitarian, berbagi sumber daya, mutual aid, koordinasi fleksibel antar kelompok sebelum dan selama aksi, adalah prinsip revolusioner anarkisme layaknya ketika menentang negara dan kapitalisme. Kondisi ini harus dipertahankan dalam aksi pemasungan petani Kendeng. Sebab, hal ini bisa saja rusak karena segelintir orang yang bermaksud baik menginginkan supaya aksi berjalan efektif dan efisien dengan mencoba mengambil kontrol langsung terhadap dukungan dan bantuan kepada petani. Tindakan seperti ini, seperti terjadi pada banyak kasus, justru berjalan sebaliknya. Tindakan ini mematikan inisiatif dari luar, karena kehendaknya untuk membantu justru memerlukan persetujuan-persetujuan dari segelintir elit aktivis. Semua yang sifatnya kesukarelaan terganti dengan kewajiban dengan penugasan. Dan ujung-ujungnya hal ini justru memungkinkan terbentuknya hirarki, baik langsung dalam bentuk struktur-struktur otoritas, atau tidak langsung dalam bentuk perbedaan antara aktivis muda dan tua, atau antara aktivis yang baru saja terlibat dengan yang sudah sejak lama dalam membantu aksi petani Kendeng.

Saat pekerja dan petani memahami hal ini, ia adalah seorang anarkis sekalipun ia sendiri tidak menyebutnya demikian.

Akan butuh waktu lama untuk menerangkan konsep *mutual-aid*, demokrasi konsensus, egalitarianisme, masyarakat paska-kelangkaan, kepemilikan bersama dsb. Mereka akan paham dalam praktik, ketika solidaritas antar gerakan dilakukan, ketika pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip egalitarian, ketika tujuan jangka panjang dari mereka tidak sekedar mendapat lahan atau peningkatan upah, tapi memiliki pabrik itu sendiri, dan memecat bos mereka! Saat pekerja dan petani memahami hal ini, ia adalah seorang anarkis sekalipun ia sendiri tidak menyebutnya demikian.

Tetapi hal ini tidak membuat pendidikan publik yang bersifat teoritik dikesampingkan. Tulisan-tulisan perlu disebar, diskusi-diskusi digiatkan, perpustakaan jalan dilakukan secara berkala. Tentu saja, dengan bahasa yang mudah dipahami. Sebab saya percaya, semua orang adalah anarkis. Mereka hanya terlalu bodoh untuk tahu dan sadar, terlalu pesimis untuk meyakini perwujudannya, atau terlalu cerdas untuk menolak label hina anarkisme.

Program Integrasi

Kita perlu mempertimbangkan bahwa sebagai mahasiswa di zaman yang menuntut semuanya lulus cepat dan biaya kuliah tinggi, aktivitas yang terlalu militan bisa membuatnya keteteran untuk menyelesaikan kuliah. Karena itu penting bagi kita untuk mempertimbangkan berbagai peluang dan sumber daya terhadap melaksanakan aktivitas kita. Program integratif karena itu menjadi penting.

Apa yang saya maksud dengan program integrasi adalah bagaimana kerja-kerja federasi bisa terlaksana tanpa harus memulainya dari awal, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya kampus yang ada. Sebagai contoh, anggota federasi pasti akan ada yang berasal dari pers mahasiswa. Ketimbang federasi mengeluarkan media baru, walau hal itu boleh-boleh saja, akan lebih baik jika anggota federasi yang tergabung ke dalam pers mahasiswa,

menggunakan medianya untuk berpropaganda dengan mengeluarkan tulisan-tulisan yang menekankan pesan anti-otoritarian, atau laporan jurnalistik yang didalamnya mengandung keberpihakan terhadap kelas pekerja. Hal yang sama juga bisa kita lakukan dengan anggota federasi yang tergabung dalam teater, untuk memproduksi naskah drama yang sejalan dengan tujuan itu.

Pembredelan pers mahasiswa, pembubaran diskusi dan nonton bersama, pelarangan pameran dan pementasan, serta penghadangan demonstrasi, yang rutin terjadi selama beberapa tahun terakhir menjadi terlalu mendesak untuk tidak kita cegah.

Milisi Mahasiswa

Ya, saya serius. Bahkan kalau perlu mahasiswa bersenjata api. Tapi mengingat kondisi yang belum memungkinkan untuk itu di tengah segala keterbatasan sumber daya, maka pikiran untuk menggunakan senjata api, saat ini, harus kita buang jauh-jauh. Tapi hal ini tidak menjadi alasan untuk tidak menyusun kekuatan untuk memukul mundur paramiliter reaksioner itu.

Pembredelan pers mahasiswa, pembubaran diskusi dan nonton bersama, pelarangan pameran dan pementasan, serta penghadangan demonstrasi, yang rutin terjadi selama beberapa tahun terakhir menjadi terlalu mendesak untuk tidak kita cegah. Pencegahan tidak dilakukan dengan demonstrasi paska-kejadian, sebab dalam konteks ini, demonstrasi sebenarnya adalah senjata orang-orang kalah. Pencegahan dilakukan sebelum dan saat teman-teman kita melangsungkan kegiatan.

Tanpa bermaksud heroik, tapi kita perlu membentuk barisan mahasiswa anti-fasis. Kita perlu mengorganisir pasukan yang bisa memberikan rasa aman terhadap kebebasan akademik di kampus, yang berani berhadapan secara tatap-muka dengan preman-preman

negara itu. Pelatihan bela diri dilakukan secara sistematis dan berkala, teknik-teknik yang diajarkan adalah teknik bela diri yang melumpuhkan, bukan membunuh. Artinya, kita harus paham bahwa dalam situasi saat ini, maka pelatihan yang harus diutamakan harus bersifat defensif. Ketika dirasa ada kegiatan yang mungkin akan terancam, milisi ini harus diorganisir, dan kemudian bisa dengan bebas dibubarkan setelah kegiatan selesai. Dalam beberapa hal teknis, nampaknya akan lebih baik jika milisi ini harus didisiplinkan (baca: pembuatan hierarki komando), yang mana harus melanggar keyakinan kita soal kekuasaan dan kepatuhan. Walau ini bisa saja diperdebatkan nanti.

Yang pasti, milisi tidak dibentuk untuk melampiaskan hasrat destruktif dari rekan-rekan mahasiswa. Mereka harus bersikap tenang, dan ketika berhadap dengan kelompok ultra-kanan itu, mereka menunjukkan sikap kooperatif dan intelektual dengan memulai perdebatan yang sehat. Ketika lawan memulai tindakan kekerasan dan memaksa kehendaknya untuk membubarkan suatu kegiatan, maka milisi harus turun tangan. Soal teknis, sekali lagi, bisa dibahas nanti.

Bagian 8

Aksi Langsung

Kasus kamerad kita di Untidar bukan bentuk aksi langsung (*direct action*) dan mungkin akan banyak dicibir oleh kamerad anarkis yang lain. Namun keberhasilan mereka perlu kita refleksikan untuk memperluas pandangan kita, untuk mencoba bereksperimen dengan segala macam cara dan mengangkat berbagai isu yang dirasa relevan, mendesak, dan sesuai dengan tujuan federasi. Salah satu cara

yang paling saya anjurkan, sebagaimana kamerad Willy Vebriandy, tentu saja adalah aksi langsung itu sendiri.

Saya setuju dengan Willy bahwa dalam konteks gerakan mahasiswa, sabotase dan aksi langsung cukup relevan untuk digunakan sebagai strategi perjuangan. Dikatakan relevan, karena sabotase dan aksi langsung bukanlah seperangkat teori atau ideologi yang sifatnya kaku, melainkan hanya sebuah pengetahuan mengenai strategi bagaimana suatu perjuangan dilakukan. Karena bentuknya yang hanya berupa strategi, sabotase dan aksi langsung bersifat fleksibel ketika diterapkan. Artinya ia dapat digunakan dan dapat pula tidak digunakan tergantung latar masalah yang dihadapi.

Adapun bentuk sabotase dan aksi langsung yang dapat dilakukan tentunya beragam tergantung kesadaran individu dalam menyikapi suatu persoalan. Hal ini dikarenakan fondasi dasar dari sabotase dan aksi langsung adalah kesadaran individu untuk bergerak secara spontan tanpa perantara apapun di luar dirinya. Tiap mahasiswa bebas mengekspresikan sikapnya atas suatu persoalan tanpa intervensi siapapun. Dalam konteks mahasiswa, perantara di luar dirinya ini dapat berupa BEM atau berbagai organisasi ekstra kampus.

Salah satu bentuk sabotase dan aksi langsung yang bisa dicoba gerakan mahasiswa adalah dengan meniru strategi para pekerja pabrik ketika mogok kerja. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, para pekerja biasanya selain melumpuhkan pabrik dengan mogok kerja, mereka juga melumpuhkan pabrik dengan merusak atau membuat mesin produksi tidak berfungsi ketika mereka sedang mogok. Strategi ini dapat dipakai dengan melakukan aksi mogok kuliah sekaligus melumpuhkan semua aktivitas yang ada di kampus. Cara melumpuhkannya ini bisa berupa mengunci semua pintu ruangan yang ada di kampus, menggembok pintu gerbang, memberi lem di lubang kunci, atau mematikan listrik dan internet di seluruh kampus dengan meretas jaringan sistem elektronik kampus. Atau yang lebih jauh lagi, mahasiswa dapat langsung mengambil alih kampus dengan menduduki gedung rektorat, fakultas, dan berbagai

tempat strategis lainnya guna dijadikan tempat beraktivitas seluruh mahasiswa. Bahkan mahasiswa juga bisa membakar kampus bila memang hal itu perlu dilakukan. Berbagai tindakan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memaksa pihak kampus untuk menuruti kemauan mahasiswa.

Contoh demonstrasi mahasiswa Chile tahun 2011-2012 lalu dapat menjadi gambaran. Kala itu, ratusan ribu mahasiswa di Chile turun ke jalan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah terhadap dunia pendidikan. Bentuk demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa ini tidak sekadar diisi oleh orasi politik dari para pimpinan mahasiswa. Tapi juga diisi dengan berbagai aksi kreatif, seperti flash-mob massal, aksi bersepeda mengitari kota, hingga ciuman massal sebagai bentuk protes politik. Berbagai aksi kreatif ini dapat dikatakan sebagai perwujudan aksi langsung karena tiap mahasiswa melakukan berbagai tindakan itu secara spontan tanpa perantara siapapun di luar dirinya. Begitulah bentuk demonstrasi yang dijiwai semangat sabotase dan aksi langsung, demonstrasi menjadi panggung bersama di mana semua orang berhak meluapkan segala ekspresinya.

Audiensi pun bila didasari semangat sabotase dan aksi langsung bentuknya tidak akan menjadi seperti yang saat ini terjadi. Audiensi tidak akan hanya melibatkan segelintir mahasiswa, tapi justru akan melibatkan seluruh mahasiswa. Audiensi yang biasanya tertutup dalam ruangan, akan pindah ke tempat terbuka agar seluruh mahasiswa dapat terlibat dalam dialog. Hal ini dilakukan karena tiap mahasiswa berhak menyampaikan sendiri pendapatnya tanpa perlu diwakilkan oleh orang lain. Tentunya model yang demikian jelas berbeda dengan praktik audiensi yang berkembang dewasa ini.

Sabotase dan aksi langsung dapat memberikan alternatif strategi perjuangan di tengah mainstream strategi yang selama ini hanya itu-itu saja. Ada tiga alasan kenapa gerakan mahasiswa perlu memakai sabotase dan aksi langsung sebagai strategi perjuangan. *Pertama*, dengan sabotase dan aksi langsung, seluruh elemen mahasiswa akan dilibatkan dalam perjuangan menyikapi suatu persoalan. Seperti yang saya uraikan di atas, ketika sabotase dan aksi

langsung digunakan, tidak ada lagi pewakilan ‘nasib’ kepada segelintir mahasiswa seperti yang selama ini ada dalam mekanisme audiensi. Semua mahasiswa berhak berpendapat, bergerak, dan berjuang sesuai kehendak dirinya dalam koridor perjuangan bersama menyikapi suatu persoalan.

Kedua, sabotase dan aksi langsung membuat gerakan mahasiswa mempunyai posisi tawar yang tinggi dihadapan musuh-musuhnya—dalam hal ini sebut saja negara atau pimpinan kampus. Kita bisa ambil contoh dalam kasus UKT. Ketika semisal pimpinan kampus tidak memenuhi tuntutan mahasiswa, mahasiswa punya posisi tawar dihadapan rektorat berupa ancaman akan terus melakukan berbagai bentuk tindak sabotase dan aksi langsung sampai tuntutan mereka dipenuhi. Ancaman ini bisa berupa mogok kuliah yang dilakukan seluruh mahasiswa, atau pelumpuhan segala aktivitas yang ada di kampus dengan menduduki rektorat atau mengunci seluruh gerbang dan pintu yang ada di kampus. Ancaman ini tentu akan membuat posisi tawar mahasiswa menjadi seimbang dengan pihak rektorat. Ketika terjadi dialog di mana pimpinan kampus menolak tuntutan mahasiswa, pihak mahasiswa bisa dengan santai mengatakan, “Kalo kalian (rektorat) gak mau ngikutin mau kita, ya udah kita akan mogok kuliah dan dudukin seluruh kampus.” Perkataan demikian dapat terlontar apabila gerakan mahasiswa memiliki posisi tawar yang sepadan di hadapan rektorat. Fenomena yang selama ini terjadi di kebanyakan kampus, ketika misal pimpinan kampus tidak memenuhi tuntutan mahasiswa, biasanya gerakan mahasiswa akan bingung menyikapinya. Kebingungan ini yang nantinya berujung pada sikap menerima begitu saja fakta bahwa tuntutannya tidak terpenuhi. Gerakan mahasiswa seperti tidak punya kekuatan menekan pihak rektorat untuk memenuhi tuntutannya. Kondisi demikian dapat diatasi bila gerakan mahasiswa punya senjata untuk menekan pihak kampus, dan salah satu senjata yang dapat dipakai adalah sabotase dan aksi langsung dalam berbagai bentuknya.

Ketiga, dengan sabotase dan aksi langsung membuat gerakan mahasiswa tidak menjadi gerakan yang mengemis kepada penguasa.

Ketika semisal tuntutan gerakan mahasiswa terhadap UKT tidak dipenuhi, gerakan mahasiswa tidak akan meratapi fakta bahwa tuntutannya tidak terpenuhi. Tapi justru akan terus melakukan berbagai tindakan yang nantinya akan memaksa tuntutannya agar dipenuhi. Semisal, dalam konteks masalah nasional. Ketika gerakan mahasiswa menuntut negara untuk menggratiskan biaya pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi dan tuntutan tersebut ditolak. Gerakan mahasiswa tidak akan mengeluh, pasrah meratapi nasib dan menerima begitu saja logika negara. Gerakan mahasiswa justru akan terus melakukan upaya perlawanan agar tuntutannya tercapai. Upaya ini bisa berupa mogok belajar nasional, pendudukan seluruh institusi pendidikan, atau pelumpuhan sarana ekonomi di seluruh Indonesia.

Bila dikontekskan dengan berbagai norma yang berlaku di Indonesia secara umum, dan di kampus secara khusus, sabotase dan aksi langsung umumnya akan dianggap sebagai perilaku amoral, pembuat kacau, atau reaksioner oleh berbagai pihak. Sabotase dan aksi langsung akan dilihat menggunakan standar baik dan buruk, bukan standar bermanfaat atau tidak. Berkembangnya persepsi ini adalah sesuatu yang wajar karena arus informasi mengenai sabotase dan aksi langsung di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Hanya saja, daripada energi kita habis memikirkan sisi baik dan buruk dari sabotase dan aksi langsung, lebih baik kita mencoba memikirkan kemanfaatan sabotase dan aksi langsung bagi keberlangsungan gerakan selanjutnya. Sebab bagaimanapun juga, “kalau kita terus-terusan hanya melakukan hal-hal yang boleh dilakukan, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai apapun,” ujar Emile Pouget.

Pemogokan Umum

Gerak juang kita nampak sangat kompromis, juga sangat evolusioner, sangat bertahap dan lambat. Tetapi mau bagaimana lagi? Saya tanya, hal paling realistis apa yang bisa kita lakukan saat ini? Membeli AK-47 dan memulai pemberontakan? Malah akan ditertawai kita nanti. Kita tidak akan menampik bahwa pertempuran

akan terjadi, kelak. Sehingga krisis-krisis finansial, peningkatan harga-harga dan kelaparan, ketiadaan lapangan pekerjaan, menjadi bukti kerakusan kapitalisme yang bisa hancur sewaktu-waktu akibat perbuatannya sendiri. Namun, menunggu kapitalisme hancur dengan sendirinya saja berarti kita sudah kalah. Karena kita tidak dapat menciptakan kesempatan, dan terbukti dari banyak pemberontakan dan revolusi yang direncanakan selalu gagal, maka kita harus mempersiapkan diri dan mengambil setiap kesempatan yang ada untuk sebuah revolusi. Membangun kekuatan dan mengambil momentum.

Kita harus cerdas membaca momentum, apakah ini saat yang tepat saat revolusi? Jika ya, maka tidak ada alasan untuk tidak memulai atau mengikuti pemogokan umum (*general strike*) yang dimulai kelas pekerja. Petani-petani perlu diyakinkan untuk memberikan solidaritas berupa logistik, karena berdasarkan pelajaran sejarah, mereka berperan penting untuk mencegah revolusi yang di luar kendali akibat penjarahan karena krisis pangan. Sementara mahasiswa, akan berperan penting dalam barikade dan pertempuran jalanan bersama rakyat miskin lainnya. Pertempuran jalanan akan dimulai hanya ketika tentara dan polisi menggunakan kekerasan. Jika tidak, saya tetap setuju dengan cara-cara damai dalam upaya merebut alat produksi dan membentuk swa-pemerintahan rakyat. Tetapi saya kira, pertempuran jalanan tetap tidak akan terelakan, sebab kapitalis tidak akan menyerahkan kekayaannya secara sukarela, sebagaimana pejabat negara tidak akan menyerahkan kekuasaannya begitu saja.

Kapitalis tidak akan menyerahkan kekayaannya secara sukarela, sebagaimana pejabat negara tidak akan menyerahkan kekuasaannya begitu saja.

Bagaimana dengan rekan komunis? Hingga batas-batas tertentu, membentuk kerjasama dan solidaritas dengan mereka adalah baik, terutama jika revolusi tidak mungkin diwujudkan dalam waktu dekat. Tapi percayalah, penyatuan kelompok kiri (unifikasi) adalah mustahil. Kelompok sosialis otoritarian akan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk merebut, lalu mempertahankan kekuasaan. Tidak susah bagi kita untuk mengambil pelajaran dari pengkhianatan mereka dalam berbagai pemberontakan dan revolusi. Kita dibujuk untuk mendukung kekuasaan mereka, menggandaikan prinsip-prinsip kita, lalu disingkirkan saat mereka sudah mapan. Tetapi bagaimanapun, mereka tetaplah saudara kita sebagai sesama manusia yang punya tujuan-tujuan mulia. Perdebatan yang sehat harus digencarkan ketimbang hanya caci maki dan permusuhan. Jika tidak, saat revolusi terjadi dan mereka menunjukan tanda-tanda pengkhianatan, mereka harus diberi pelajaran. Kepala mereka harus dipukul pentungan karena kebodohannya.

Bagian 9

Pesan dan Harapan

Banyak anarkis, terutama yang individualis dan inseruksionis akan menghindari organisasi karena berbagai alasan. Namun keputusan mereka harus dihormati sebagai kediriannya yang tidak boleh diganggu. Alih-alih dijauhi dan dimusuhi, dia harus tetap dirangkul, bahkan walau menolak menjadi anggota federasi. Lagipula, tidak mungkin pula dia akan benar-benar mengasingkan

diri, atau tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh federasi. Selain itu, seorang platformis tidak mungkin pula menolak inseruksi, terutama jika momentum revolusi tersebut tercipta.

Tapi karena revolusi tersebut tidak kunjung datang, kita sebagai anarkis yang berada dalam posisi yang kritis dan radikal, kerap gelisah dan cemas. Karena itu tidak heran kita kerap terjerumus terhadap aksi-aksi negatif. Karena itu pula anarkisme, sengaja atau tidak disengaja, menjadi salah satu kata yang kerap disalahartikan. Ini menimbulkan kesan pemberontakan yang berlebihan, bahkan terkadang terkesan macho dan maskulin. Akibatnya, kita sangat sulit untuk menarik massa dari perempuan, yang maaf, biasanya memang langsung keok melihat massa aksi yang mengenakan bandana hitam.

“

Jika buruh dan petani tidak ada di samping mahasiswa dalam menyusun barikade, maka itu bukanlah revolusi.

Saya juga melihat kecenderungan avonturis, bahwa revolusi hanya berarti pertempuran perjalanan, dan hal ini dianggap seru dan menyenangkan. Saya setuju bahwa hasrat destruktif adalah kekuatan kreatif, apalagi itu ditujukan untuk membangun sebuah tatanan yang baru. Tapi ingat, jika buruh dan petani tidak ada di samping mahasiswa dalam menyusun barikade, maka itu bukanlah revolusi. Itu hanya petualangan melempar molotov dan memukuli polisi, dan bisa dipastikan akan gagal.

Lebih menyedihkan lagi, terkadang nada perlawanan kita terlalu lantang sehingga hanya berupa caci maki belaka. Hal ini akan merugikan pergerakan kita, karena bisa-bisa dianggap anti-intelektual. Dalam contoh sebenarnya saja, ketimbang mengatakan “hancurkan negara,” lebih baik kita berseru “bentuk Konfederasi Indonesia!”

Kita kerap dituduh reaksioner, artinya, kita hanya bentuk dari reaksi terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Ini tentu tidak benar, bahkan pemerintahan yang baik pun, akan tetap menindas. Lagipula, apakah ada pemerintah yang baik? Kita menolak pemerintah dan kapitalisme bukan karena alasan-alasan reaksioner, tetapi karena secara fundamental: keduanya adalah penghambat utama dalam kebebasan manusia.

Apa yang telah saya uraikan dalam panduan ini mungkin nampak sangat kompleks jika dibayangkan. Tapi percayalah, jika dipraktikan, federalisme justru jauh lebih rasional dan manusiawi. Ia menghindari tali-temali birokrasi formal yang menghalangi setiap inisiatif spontan karena prosedurnya yang berbelit-belit. Dengan itu pula kita harapkan federasi mahasiswa mampu menjadi kekuatan yang revolusioner, yang otonom, yang mampu bergerak bak di bawah satu komando. Tanpa komandan tentunya.

Panduan ini kiranya tidak mengekang segala tindakan-tindakan kita ke depan. Tidak pula menjadi dogmatik seperti anjuran Lenin yang kemudian menjadi Leninisme. Panduan ini hanyalah saran dari pemikiran saya sendiri, dari hasil renungan soal kondisi gerakan mahasiswa di Indonesia, serta himpunan saran-saran yang dikeluarkan oleh pendahulu kita dan pemikiran serta pengalaman kawan-kawan mahasiswa yang lain. Sudah begitu ada beberapa hal penting yang tidak saya bahas secara mendalam, misalnya status keanggotaan dan pengkaderan.

Saya tidak pernah bermaksud untuk mencari anggota yang banyak, tapi saya tidak memungkiri bahwa hal itu mungkin akan lebih baik. Saya lebih tertarik untuk menularkan gagasan sosialisme libertarian ketimbang memaksa mereka menjadi anggota federasi walau tidak mengetahui prinsip-prinsipnya. Saya lebih menyukai mahasiswa yang menjadi sosialis libertarian dan simpatik dengan federasi, serta terlibat dalam kegiatan federasi dan memberikan dukungan dan bantuan. Mereka yang melakukan itu, sesungguhnya justru jauh lebih seperti “anggota”, bahkan walau tidak tergabung ke

dalam federasi, ketimbang anggota federasi yang tidak melakukan apa-apa.

Terkadang kita bosan untuk mendiskusikan hal itu-itu saja. Misalnya, “apa itu anarkisme?” Namun kita tidak seperti itu. Sebab akan ada orang-orang baru, orang yang berpengetahuan sangat dasar saja, dan mereka tidak boleh ditinggal. Jika tidak, maka federasi mahasiswa akan mati ketika yang lebih tua dan berpengetahuan luas lulus. Tidak ada transfer pengetahuan. Pengkaderan mungkin mengesankan bahwa akan ada relasi timpang antara angkatan muda dan angkatan tua, antara junior dan senior. Tetapi saya perlu ingatkan bahwa ada perbedaan mendasar antara bersikap egaliter dengan mengakui bahwa memang beberapa orang jauh lebih berpengetahuan. Ada perbedaan antara setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar dengan orang yang memang telah belajar sejak lama. Jadi saran saya, pendidikan yang sudah diatur materinya mungkin dibutuhkan untuk diadakan secara berkala setiap satu atau dua tahun sekali, terlepas dari diskusi-diskusi rutin, seperti kebanyakan organisasi ekstra-kampus telah lakukan.

Terakhir, saya menjadi sosialis libertarian bukan supaya merasa diri lebih hebat ketimbang kebanyakan orang. Federasi bukanlah pembebas, sebab sebuah proses pembebasan tidak dilakukan oleh hanya satu atau kelompok tertentu. Pembebas itu tidak ada, rakyat membebaskan dirinya sendiri. Lagipula sudah dijelaskan dalam pengantar bahwa pada dasarnya semua orang adalah anarkis, mereka bahkan jelas-jelas mempraktikan anarkisme dalam kehidupan sehari, dalam pribadi dan dalam kehidupan sosialnya. Beberapa orang bahkan membenci negara, walau tidak dipersenjatai oleh seperangkat teori anarkisme. Karena itu kita perlu memperbesar kekuatan revolusioner ini, dan jangan justru merendahkan mereka, yang mana justru menjadi kontra-produktif dengan tujuan kita.

Revolusi tidak terjadi besok, tapi ini tidak menjadi alasan untuk menjadi pesimis dan meninggalkan begitu saja proyek revolusioner sosialis libertarian. Penetrasi kapitalisme semakin besar dan pemerintah semakin represif; di satu sisi krisis ekologi semakin

memburuk dan mengancam masa depan kita semua; ekspolitasi perempuan dan kebebasan seksual tidak kunjung membaik; penguasaan tanah-tanah semakin timpang dan kapitalisme membuat pernak-pernik yang mengaburkan fakta bahwa penindasan tetap ada walau terlihat lebih manusiawi; membangun kekuatan sudah menjadi sangat penting dan mendesak. Kita harus bergerak sekarang. Mahasiswa bisa menjadi pelopor.